

**LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV**



**TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi atau unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Tata Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 4. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 5. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 6. Seksi Perubahan Iklim;

f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan; dan
3. Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.

g. Bidang Pertanahan, membawahi :

1. Seksi Pengadaan Tanah;
2. Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
3. Seksi Perizinan Pertanahan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 adalah sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".**

C. Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu : **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah dan Kehutanan".**

D. Belanja, Program APBD

Total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 51.920.073.912,00 yang terdiri atas :

- 1. Total Pagu OPD : Rp. 20.647.864.155
- 2. Total Pagu BLUD : Rp. 31.272.209.757

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 terdiri dari sebagai berikut :

Pagu APBD Rp. 20.647.864.155,00

- Belanja Operasi : Rp. 20.647.864.155,-
- Belanja modal : Rp. 0,-
- Belanja tidak terduga : -
- Belanja transfer : -

Pagu BLUD Rp. 31.272.209.757,00

- Belanja Operasi : Rp. 24.272.209.756,50,-
- Belanja modal : Rp. 7.000.000.000,00,-
- Belanja tidak terduga : -
- Belanja transfer : -

E. Program dan Anggaran APBD

Terdapat 17 (tujuh belas) program kegiatan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan program dan rincian anggaran antara lain sebagai berikut :

Program kegiatan APBD

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	192.719.597,00
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.079.435,00
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	88.381.493,00

4.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	113.216.966,00
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	143.640.445
6.	Program Penatagunaan Tanah	80.767.445
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	47.401.945.272,50
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1.777.305.554,00
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	95.553.955,50
11.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah B3	101.092.000,00
12.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (PPLH)	269.230.109,00
13.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.000.000,00
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	565.721.561,00
15.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	625.431.592,00
16.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	170.915.487,00
17.	Program Pengelolaan Persampahan	232.073.000,00
	Total	51.920.073.912,00

F. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yang mengacu pada RENSTRA 2025- 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	95	95	
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	52	52,5	53	53,5	
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pegolah sampah(%))	%	n/a	21	21,5	23	25	35	
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	44	45	46	62	

G. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel tersebar di beberapa lokasi dan setiap kegiatan dapat mencakup hampir seluruh 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

a) Kota Palembang

kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK

- Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pemantauan Kualitas Air Laut
 - Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
 - Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - Inventarisasi lembaga masyarakat/keompok masyarakat bidang lingkungan hidup
- b) Kota Lubuk Linggau
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pemantauan Kualitas Air Laut
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c) Kota Pagaram
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)

- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d) Kota Prabumulih

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

e) Kabupaten Ogan Ilir

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

f) Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- g) Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pemantauan Kualitas Air Laut
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- h) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pemantauan Kualitas Air Laut
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- i) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Pemantauan Kualitas Udara
 - Pemantauan Kualitas Air Laut
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- j) Kabupaten Muara Enim
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

k) Kabupaten Lahat

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

l) Kabupaten Empat Lawang

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

m) Kabupaten Musi Rawas

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim

- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

n) Kabupaten Musi Banyuasin

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

o) Kabupaten Banyuasin

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

p) Kabupaten PALI

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara

- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

q) Kabupaten Muratara

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

H. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

a. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memastikan target rencana program dan kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui penilaian hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah agar realisasi kegiatan yang telah ditetapkan tercapai sesuai Renstra.

I. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TA 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV TA 2025 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah :

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	51.920.073.911	49.210.704.132,00	95	94,78	100	87,69
Belanja Operasi	44.920.073.912	42.303.707.602,00	95	94,18	100	87,69
Belanja Modal	7.000.000.000	6.906.996.530	95	98,67	100	100
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

2) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja DLHP Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Triwulan IV TA 2025 sebesar **Rp. 49.210.704.132,00** atau **94,78%** dan realisasi fisik **87,69%**.

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi	Keterangan
1	90 % ≤ 100 %	Tinggi	Hijau	
2	66 % ≤ 90 %	Sedang	Kuning	
3	0 % ≤ 65 %	Rendah	Merah	

J. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET TAHUNAN						
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Urusan Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	95	95	95	96	96	96
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	95	95	95	96	96	96
3	Persentase Konflik Lahan yang Terfasilitasi	%	14	100	100	100	100	100
Bidang Urusan Lingkungan Hidup								
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Perusahaan	17	18	18	18	19	19
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
6	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	75,48	75,68	75,88	76,08	76,28	76,48
7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8
8	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	68,42	68,49	68,56	68,63	68,7	68,76
9	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	70,75
10	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	18,5	19,67	20,85	22,02	23,2	24,37
11	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	ton CO2 eq	88,268	89,057	-	-	-	-

12	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	38	39	40	40	40	40
13	IKPS (Pengelolaan Sampah Timbunan)	Point	45	52	52,5	53	53,5	54
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	43	47	48	49	49	50

K. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

1. (SIPP-LINK SUMSEL) dan Ancer On The Spot (Anti Cemar On The Spot) Piagam penghargaan dari kepala lembaga administrasi negara Nomor 936/K.1/PDP.09 Tanggal 16 November 2019.
2. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 atas Program Kampung Iklim 2022 Kategori Pembina Proklim Tingkat Provinsi
3. Perhargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**BAPETEN**) Kepada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir dengan kegiatan Pengukuran dan Analisa Tahun 2022
4. Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut (Si-Gambut) Nominasi Penghargaan Bhumandala – Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Tahun 2023.
5. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Oktober 2023
6. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 23 Oktober 2023
7. Penghargaan Kategori Terinovasi atas Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan November 2023.
8. Penghargaan Pembinaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2024.
9. Penghargaan Adi Niti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Laboratorium Pemerintah dengan Ruang Lingkupnya Lengkap dan Taat dalam Perpanjangan Registrasi tanggal 10 September 2024.
10. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 1 Desember 2025.

L. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi adalah :

1. APBD :

Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Sebagian pelaku usaha masih belum tertib dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL dan UKL-UPL). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses evaluasi serta Masih terdapat pelaku usaha/kegiatan yang belum menyusun dokumen lingkungan atau belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin, serta keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. menghambat pencapaian indikator kepatuhan lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

Masyarakat di beberapa wilayah prioritas masih memiliki kesadaran rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini berdampak pada tingginya timbunan sampah liar, rendahnya partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah, dan peningkatan beban pada TPA.

4. Pengelolaan Pertanahan

Beberapa proses penataan dan penyelesaian sengketa pertanahan terkendala oleh kurang lengkapnya dokumen kepemilikan atau peta dasar pertanahan. Akibatnya, penyelesaian konflik atau verifikasi lapangan memerlukan waktu lebih lama dari target kinerja.

b. Tindak lanjut :

1. APBD

Agar dilakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi (DPUBMTR, DPMPTSP Prov. Sumsel) dan pemerintah pusat terkait keterbatasan sistem OSS untuk penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Melakukan pembinaan rutin dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan RKL-RPL/UKL-UPL, termasuk penyediaan layanan konsultasi teknis dan pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan, serta mendorong kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengelolaan Sampah

Mengintensifkan kampanye dan edukasi pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sekolah, komunitas, dan perangkat desa/kelurahan.

4. Pengelolaan Pertanahan

Melakukan koordinasi dengan BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian sengketa serta melengkapi dokumen pendukung penataan batas atau pemanfaatan ruang.

M. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sumber APBD pada Triwulan IV TA 2025, untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Arif H. Mansyah, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1976042519941210

